

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Tingkat Kesadaran Siswa

Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai tingkat kesadaran siswa terlebih dahulu penulis akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kesadaran

Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Berdasarkan hal tersebut bahwa sikap atau perilaku yang sadar selalu dilakukan dengan keadaan tahu, mengerti, merasa dan insyaf. Seseorang sadar jika ia tahu, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu, khususnya sadar atas hak dan kewajiban sebagai seorang siswa.

Menurut Koentjaraningrat dkk, (1984: 91) memberikan pengertian tentang kesadaran sebagai berikut:

1. Hal yang dirasakan atau dialami seseorang individu.
2. Keseluruhan perasaan dan pengalaman seseorang individu dan jiwa seseorang individu yang berhubungan dengan hal itu, proses-proses mana berhenti waktu tidur, pingsan, atau koma.

Menurut Kosasih Djahiri (Kumpulan beberapa sarjana, 1985: 25) mengemukakan tingkat kesadaran sebagai berikut:

- a. Patuh atau sadar karena takut pada orang atau kekuasaan/ paksaan.
- b. Patuh karena ingin dipuji.
- c. Patuh karena kiprah umum/ masyarakat.
- d. Taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban.
- e. Taat karena dasar keuntungan atau kepentingan.
- f. Taat karena memang hal tersebut memuaskan baginya.
- g. Patuh karena dasar prinsip etis yang layak dan universal.

Menurut Sigmund Freud yang dikutip oleh Mohammad Fadhil (1988: 9-10) “kehidupan manusia itu terdiri dari dua bagian yaitu alam sadar dan alam tidak sadar. Alam sadar merupakan bagian terbesar dalam kehidupan individu, sedangkan alam tidak sadar hanya bagian terkecil dari kehidupan individu”.

Kesadaran seseorang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain mencakup sudut pandang pengetahuan dan pengertiannya terhadap hukum atau aturan, dari sudut sikapnya terhadap hukum, dan sudut tindakannya terhadap hukum. Maka, sebagai indikator dan kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto (1982: 159) bahwa ada empat indikator kesadaran hukum yaitu

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum.
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum.
4. Pola-pola perikelakuan hukum”.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat diketahui bahwa kesadaran adalah sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, pengalaman dan proses berpikir serta jiwa seseorang. Apabila seseorang sadar akan suatu peraturan dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang ditampilkan seseorang berdasarkan apa yang

diketahui, dimengerti, sehingga ia menaati dan menghargai aturan yang telah ditentukan.

2. Perbedaan Antara Siswa Laki-laki dan Siswa Perempuan

Perbedaan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan jelas terlihat dari identitas jenis kelaminnya. Orang telah berdebat mengenai perbedaan identitas jenis kelamin sejak lama. Berabad-abad, pengalaman dan intuisi pribadi merupakan landasan dari diskusi-diskusi semacam ini. Dewasa ini, teori-teori dan penelitian ilmiah memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih seimbang dan mendalam tentang perbedaan perilaku menurut identitas jenis kelamin.

Istilah jenis kelamin dan gender sering kali digunakan bergantian, yang membedakannya adalah, jenis kelamin didefinisikan sebagai istilah biologis berdasarkan perbedaan anatomi dan fisik antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin individu, termasuk peran, tingkah laku, kecenderungan, dan atribut lain yang mendefinisikan arti menjadi seorang laki-laki atau perempuan dalam kebudayaan yang ada. Peran gender mempengaruhi tingkah laku laki-laki dan perempuan di sekolah, di rumah, dan dalam pekerjaan. Laki-laki dan perempuan sering kali menunjukkan tingkah laku yang berbeda atau sikap yang berbeda, misalnya lebih besarnya perhatian terhadap penampilan pada perempuan daripada laki-laki.

Menurut Parsons dan Robert Balesn yang dikutip oleh Linda L. Davidoff (1991: 325) dalam buku Psikologi Suatu Pengantar, menyatakan bahwa

Laki-laki berperan sebagai instrumental, atau yang berorientasi kepada tugas, dominan, aktif, dan mementingkan penggunaan otak. Sedangkan perempuan memainkan peran ekspresif, lemah lembut, baik hati, dan peka terhadap perasaan orang lain. Selain itu, berdasarkan pengaruh budaya wanita diharapkan untuk memegang peran mengasuh, penurut, dan bertanggung jawab. Sedangkan laki-laki dituntut untuk bersikap lebih percaya diri dan mandiri.

Menurut Sigmund Freud yang dikutip oleh Sarlito Wirawan.S (2008: 87) mengemukakan perbandingan antara laki-laki dengan perempuan sebagai berikut:

1. Anak perempuan lebih bersifat sosial daripada laki-laki
2. Anak perempuan lebih mudah terpengaruh
3. Anak perempuan punya harga diri yang lebih rendah
4. Anak perempuan lebih mudah mempelajari peran dan tugas yang lebih sederhana
5. Anak laki-laki lebih analisis
6. Anak perempuan lebih dipengaruhi oleh bakat, sedangkan anak laki-laki oleh lingkungan
7. Anak perempuan kurang memiliki hasrat untuk berprestasi
8. Anak perempuan cenderung lebih mendengarkan, sedangkan anak laki-laki lebih melihat.

Teori Freud ini dianggap oleh para ilmuwan yang lain sebagai terlalu berorientasi pada laki-laki dan menganggap rendah perempuan. Sehingga muncul studi-studi tentang perempuan, yang dipelopori oleh K. Horney yang mengumpulkan bukti-bukti bahwa anggapan-anggapan tersebut tidak benar.

Kemudian menurut Sandra Bem yang dikutip oleh Sarlito Wirawan.S (2008: 89) dalam buku Psikologi Remaja, dijelaskan bahwa “sifat kelaki-lakian (*masculinity*) dan kewanitaan (*femininity*) bukanlah merupakan dua hal yang bertolak belakang, terlepas satu dari yang lainnya dan tidak selalu terkait dengan jenis kelamin

seseorang”. Bem mencoba mengukur sifat-sifat kelaki-lakian (ambisius, aktif, kompetitif, objektif, mandiri, agresif, pendiam dan seterusnya) dan sifat-sifat kewanitaan (pasif, lemah lembut, subjektif, dependen, emosional, dan sebagainya) dari sejumlah orang dalam percobaannya.

Banyak psikolog yang merancang penelitian untuk mengetahui perbedaan perilaku antara laki-laki dengan perempuan. Salah satu temuannya ialah bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memperlihatkan ciri yang amat luas, dan luasnya ciri ini saling tumpah tidih. Misalnya, biasanya laki-laki dianggap lebih agresif daripada perempuan, namun secara rata-rata pada perempuan juga ditemukan ciri-ciri tersebut. Dan perlu diketahui bahwa perilaku yang dikaitkan menurut perbedaan jenis kelamin adalah perilaku-perilaku yang sederhana. Dan pada kenyataannya perbedaan perilaku yang disebabkan karena jenis kelamin sedikit saja muncul sepanjang kehidupan seseorang. Berdasarkan pengamatan ini, maka ditemukan bahwa ciri-ciri maskulin atau feminim lebih banyak ditentukan oleh budaya masyarakat setempat yang dari waktu ke waktu dapat saja mengalami perubahan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari tabel berikut,

2.1 Tabel Perbedaan Antara Laki-laki dengan Perempuan

Ciri-ciri	Bidang Kelebihan Laki-laki	Bidang Kelebihan Perempuan
Kemampuan intelektual	Kemampuan matematis lebih tinggi dan keterampilan spesial visual.	Kecakapan verbal.
Kesehatan	Kesehatan mental (lebih sedikit memperlihatkan	Kesehatan fisik (lebih jarang terserang

	problem psikologis seperti kecemasan atau rasa rendah diri ketimbang perempuan).	penyakit ketimbang laki-laki, lebih tahan terhadap penyakit sebelum dan sesudah lahir).
Kemampuan fisik	Kekuatan dan penguasaan otot keras, ketepatan pengindraan.	Kepekaan jari tangan, suara dengan nada tinggi, nada suaranya dapat berubah dengan cepat.
Sifat kepribadian	Aktivitas, agresi, sangat ingin tahu tentang peristiwa dan obyek-obyek non-sosial, impulsif, dan dominasi.	Ketaatan, ingin tahu terhadap hal sosial, tergantung, empati, dan tanggung jawab sosial.

Terdapat perbedaan bersifat internal dan substansial yang jelas antara siswa laki-laki dan siswa perempuan ditinjau dari segi fisik, seperti dalam pertumbuhan tinggi badan, rambut, organ genitalia internal dan eksternal, serta jenis hormonal yang mempengaruhi variasi ciri-ciri fisik dan biologinya. “Hormon memegang peran penting dalam perkembangan genitalia siswa laki-laki dan siswa perempuan, termasuk mempengaruhi organisasi otak dan kelenjar pituitari yang mengendalikan sekresi hormon gonad pada masa pubertas (Otten,1995)”.

Menurut pandangan para ahli kontemporer yang telah melakukan penelitian terhadap psikologi perempuan diketahui bahwa perbedaan kepribadian perempuan dan laki-laki banyak dipengaruhi oleh ekspektasi dan sosialisasi dari orang tua daripada oleh faktor fisiologis. Faktor fisiologis dan biologis hanya

mempersiapkan berlangsungnya tahapan-tahapan penting yang mempengaruhi perbedaan gender seseorang.

Banyak ahli psikologi saat ini, yang berusaha untuk memperbaharui konsep berfikir masyarakat tentang peran gender. Carl Jung adalah seorang ahli psikologi yang mencoba menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia memiliki dua aspek sekaligus di dalam dirinya, yaitu aspek feminim dan maskulin, dimana kedua aspek tersebut dalam psikologi dikenal dengan istilah androgenitas, yang berasal dari bahasa Yunani “andro” adalah laki-laki, dan “gyne” adalah perempuan. Dalam hal ini, androgenitas tidak semestinya diartikan sebagai aspek jasmaniah, akan tetapi merupakan keadaan kesadaran individu dimana maskulin dan feminim saling bertemu dalam eksistensi yang harmonis. Feminitas dan maskulinitas seringkali dipandang sebagai citra yang bersifat internal dan menetap, padahal sebenarnya merupakan produk budaya yang dinamis dan berkembang.

Menurut teori feminis, perbedaan perempuan dan laki-laki sebagian besar disebabkan oleh penekanan perbedaan peran sebagaimana dibentuk oleh kultur. Kepribadian perempuan biasanya dihubungkan dengan sifat pendiam, patuh, dan status minoritas. Dari hasil studi tersebut, tidak menemukan bukti-bukti yang kuat bahwa potensi perempuan dan laki-laki itu berbeda, sepanjang keduanya memperoleh perlakuan, kesempatan, dan ekspektasi.

3. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah

a. Pengertian Tata Tertib Sekolah

Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai pelaksanaan tata tertib sekolah terlebih dahulu penulis akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tata tertib.

Menurut intruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dikutip oleh Suryosubroto (2010: 81) dalam buku manajemen pendidikan di sekolah, dijelaskan bahwa “tata tertib sekolah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggarannya”.

Menurut Zakiah Darajat (1992: 34) dalam buku pendidikan para remaja, menyebutkan “bahwa semua peraturan-peraturan yang mengarahkan kepada sikap dan perilaku merupakan tata tertib yang harus ditaati dan dilaksanakan”.

Pengertian lain mengenai tata tertib dikemukakan oleh Meichati (1980: 151) dalam buku pengantar ilmu pendidikan, menyatakan bahwa “tata tertib adalah peraturan-peraturan yang mengikat seseorang atau kelompok, guna menciptakan keamanan, ketentraman, orang tersebut atau kelompok orang tersebut”.

Tata tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh sekolah, mengatur hak dan kewajiban, larangan-larangan, dan sanksi (Djuita, 1987: 19). Dalam pernyataan Hoekema seperti dikemukakan oleh Dannels (2000: 1) “...*codes of conduct based*

on three overarching moral/ethical principles : preventing harm, upholding freedom, and fostering community". Pernyataan Hoekema memberi pelajaran bahwa tata tertib yang disusun antara lain harus memberi landasan bagi upaya pencegahan perilaku menyimpang siswa.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tata tertib sekolah adalah suatu sistem yang dibuat untuk mengarahkan siswa dan guru untuk bersikap dan berperilaku sesuai peraturan sekolah dengan tujuan untuk menanamkan sikap dan perilaku kepada siswa yang didasarkan atas nilai-nilai yang berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan serta membentuk karakter anak secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangan siswa agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan. Peraturan yang dibuat oleh sekolah merupakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua perangkat sekolah mulai dari para siswa, dewan guru, kepala sekolah dan pegawai/karyawan administrasi.

Menurut Suharsimi Arikunto (1993: 123), semua peraturan yang berlaku umum maupun khusus meliputi tiga unsur yaitu:

1. Perbuatan atau perilaku yang diharuskan dan yang dilarang
Contohnya : Jika terlambat datang harus lapor kebagian pengajar untuk memperoleh surat keterangan keterlambatan yang harus diserahkan kepada guru yang sedang mengajar.
2. Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab pelaku atau yang melanggar peraturan
Contohnya : Jika terlambat dan tidak melapor kebagian pengajar dianggap tidak masuk sekolah, dan setibanya di kelas tidak diizinkan mengikuti pelajaran.

3. Cara dan prosedur untuk menyampaikan peraturan kepada subyek yang dikenai peraturan tersebut.
Contohnya : Peraturan tentang keterlambatan datang ke sekolah dikomunikasikan kepada siswa dan orang tua secara tertulis pada waktu mereka mendaftarkan kembali sesudah dinyatakan diterima di sekolah yang bersangkutan.

Hukuman juga dapat mengontrol siswa agar taat dalam mematuhi aturan. Sebab dengan mendapat hukuman siswa menjadi takut untuk mengulangi perbuatannya yang melanggar peraturan itu. Tetapi harus dilihat juga hukuman yang di berikan. Hukuman yang diberikan tidak semata-mata untuk menyiksa dan mengekang siswa. Tapi dengan cara yang baik dan bersifat mendidik. Sebab dengan mendapat hukuman yang sekenanya dapat merusak mental siswa dan mengganggu psikologis siswa sendiri.

Menurut Kohlberg yang dikutip oleh C. Asri Budiningsih (2004: 31), alasan-alasan atau motif-motif yang diberikan orang untuk patuh terhadap peraturan atau perbuatan moral sebagai berikut:

- a. Tahap I : Patuh pada aturan untuk menghindari hukuman
- b. Tahap II : Menyesuaikan diri untuk mendapatkan ganjaran, kebajikannya dibalas dan seterusnya.
- c. Tahap III : Menyesuaikan diri untuk menghindari ketidaksetujuan, ketidaksetenangan orang lain.
- d. Tahap IV : Menyesuaikan diri untuk menghindari penilaian oleh otoritas resmi dan rasa diri bersalah yang diakibatkannya.
- e. Tahap V : Menyesuaikan diri untuk memelihara rasa hormat dari orang netral yang menilai dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat.
- f. Tahap VI : Menyesuaikan diri untuk menghindari penghukuman atas diri sendiri

Agar tata tertib sekolah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka harus diikuti oleh berbagai larangan, sanksi dan penghargaan. Tata tertib sekolah

harus dirumuskan secara tertulis, dan harus mencakup sanksi-sanksi yang akan diterima jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada.

Tata tertib di sekolah mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Tugas dan kewajiban
 1. Dalam kegiatan intra sekolah
 2. Dalam kegiatan ekstrakurikuler
- b. Larangan-larangan bagi para siswa
- c. Sanksi-sanksi bagi para siswa

Tata tertib harus disertai dengan sanksi yang tegas, penerapan sanksi merupakan salah satu pendukung untuk meningkatkan disiplin siswa. Menurut Douglas MC. Groger dalam Thoha (1994: 237) “sanksi tersebut mampu memotivasi seseorang untuk berperilaku disiplin”.

b. Keharusan Adanya Tata Tertib Sekolah

Adanya tata tertib sekolah adalah untuk menjamin kehidupan sekolah yang tertib dan tenang, hingga kelangsungan hidup sosial pun dapat dicapai. Kewajiban seorang siswa adalah menyesuaikan diri terhadap peraturan-peraturan tersebut. setiap pelanggaran akan mengakibatkan gangguan bagi siswa bahkan kehidupan seluruh siswa. Demikian pula halnya dengan kedatangan siswa ke sekolah. Di sekolah ia menjadi anggota baru bagi masyarakat sekolah, barulah diketahui oleh siswa bahwa dalam kesatuan sosial sekolah tersebut terdapat peraturan tata tertib yang baru, yang berlaku bagi siswa, dan apabila siswa tersebut tidak dapat menyesuaikan diri, ia akan menjadi pengganggu tata tertib yang berarti ia melanggar tata tertib sekolah. Peraturan tata tertib sekolah selalu

dilengkapi dengan sanksi-sanksi tertentu, yang berpuncak pada pemberian hukuman.

Bagi siswa yang hidup kurang mendapatkan peraturan dari tata tertib dalam keluarga, akan bereaksi negatif terhadap peraturan tata tertib tersebut. Reaksi negatif itu timbul karena anak memaksakan peraturan tata tertib tersebut sangat berat bagi siswa. Salah satu bentuk frustrasi, yaitu perasaan tidak puas karena adanya keinginan yang terhalang.

Berdasarkan hal tersebut ada beberapa cara untuk mengurangi frustrasi siswa, menurut Agoes Soejanto (2005: 110) dalam buku Psikologi Perkembangan, antara lain:

- a. Tidak terlalu beratnya tuntutan sekolah
- b. Mengurangi keketatan berlakunya tata tertib
- c. Memberi contoh yang banyak
- d. Menjelaskan maksud dan tujuan tata tertib
- e. Tidak obral dengan hukuman

Suatu hukuman yang sejati harus bertalian dengan kata hati. Artinya akibat hukuman itu harus mewujudkan terbentuknya sifat positif pada siswa, bukan sebaliknya. Menurut Agoes Soejanto (2005: 112) dalam buku Psikologi Perkembangan, mengemukakan syarat-syarat hukuman sebagai berikut:

- 1) Hukuman harus menerbitkan rasa bersalah.
- 2) Hukuman harus selalu menimbulkan rasa menderita bagi si penghukum.
- 3) Hukuman harus berakhir dengan pengampunan.

Patuh pada tata tertib sekolah adalah salah satu kewajiban siswa sebagai seorang pelajar. Salah satu keberhasilan seorang pelajar dapat dilihat dari perubahan perilaku yang menjadi lebih baik. Dengan patuh terhadap tata tertib sekolah, siswa dapat dikatakan telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang pelajar dengan baik, serta memiliki disiplin dan sikap tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Setiap peraturan itu bersifat mengikat, artinya siapapun yang berada pada lingkungan yang memiliki suatu peraturan secara tidak langsung siswa tersebut memiliki tanggung jawab pada peraturan tersebut. Ketika siswa tersebut mematuhi peraturan yang ada maka ia telah bersikap disiplin dan ketika berbuat sebaliknya, maka ia telah bersikap tidak disiplin dan akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Pada pelaksanaannya apabila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib yang telah ditetapkan dapat dikenai sanksi atau hukuman sebagai berikut:

- 1) Teguran langsung dari guru
- 2) Peringatan langsung oleh guru
- 3) Dikenakan point terhadap pelanggaran yang siswa lakukan
- 4) Dikeluarkan sementara
- 5) Dipecat sebagai murid atau dikeluarkan.

c. Tujuan Tata Tertib Sekolah

Menurut Hurlock (1990: 85) bahwa “peraturan bertujuan untuk membekali anak dengan pedoman berperilaku yang disetujui dalam situasi tertentu”. Misalnya dalam peraturan sekolah, peraturan ini memuat apa yang harus dilakukan dan apa

yang tidak boleh dilakukan oleh siswa, sewaktu berada di lingkungan sekolah. Tujuan tata tertib adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang menunjang terhadap kelancaran, ketertiban dan suasana yang damai dalam pembelajaran.

Menurut Kusmiati (2004: 22), bahwa tujuan diadakannya tata tertib salah satunya sesuai dengan yang tercantum dalam setiap butir tujuan tata tertib, yaitu:

- a. Tujuan peraturan keamanan adalah untuk mewujudkan rasa aman dan tenang serta bebas dari rasa takut baik lahir maupun batin yang dirasakan oleh seluruh warga, sebab jika antar individu tidak saling mengganggu maka akan melahirkan perasaan tenang dalam diri setiap individu dan siap untuk mengikuti kegiatan sehari-hari.
- b. Tujuan peraturan kebersihan adalah terciptanya suasana bersih dan sehat yang terasa dan nampak pada seluruh warga.
- c. Tujuan peraturan ketertiban adalah menciptakan kondisi yang teratur yang mencerminkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan pada tata ruang, tata kerja, tata pergaulan bahkan cara berpakaian.
- d. Tujuan peraturan keindahan adalah untuk menciptakan lingkungan yang baik sehingga menimbulkan rasa keindahan bagi yang melihat dan menggunakannya.
- e. Tujuan peraturan kekeluargaan adalah untuk membina tata hubungan yang baik antar individu yang mencerminkan sikap dan rasa gotong royong, keterbukaan, saling membantu, tenggang rasa dan saling menghormati.

Menurut Reynolds (2001: 39) yang mengemukakan bahwa,

“School effectiveness research has long pointed to the importance of school-wide behavior policies in creating the academically oriented, high-achieving school. It can often be fruitful to involve students in the making of rules in order to encourage a sense of ownership and shared responsibility and shared responsibility over them and to involve (especially older) students in policing rules and procedures as well”. (Tata tertib sekolah dapat menciptakan disiplin dan orientasi akademis warga sekolah pada khususnya, dan meningkatkan capaian sekolah pada umumnya. Dengan tata tertib sekolah, warga sekolah diharapkan dapat mengembangkan pola sikap dan perilaku yang lebih disiplin dan produktif. Dengan tata tertib tersebut, warga sekolah memiliki pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah).

Menurut Rudi, tujuan tata tertib adalah sebagai berikut:

- a. Agar sekolah tertib
- b. Agar kita dapat mengikuti proses KBM (kegiatan belajar mengajar)
- c. Melatih untuk tepat waktu
- d. Melatih kita disiplin
- e. Melatih kita untuk mandiri
- f. Melatih kita untuk mentaati peraturan di masyarakat kelak
- g. Melatih respon kita dalam menyikapi sebuah peraturan

sarwono-supeno.blogspot.com/2012/04/fungsi-tata-tertib.html (19-02-2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka setiap siswa bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, bersih, indah dan penuh kekeluargaan, agar proses interaksi antar siswa dalam rangka penanaman dan pengembangan nilai, pengetahuan, keterampilan dan wawasan dapat dilaksanakan secara baik.

d. Peran dan Fungsi Tata Tertib Sekolah

Keberadaan tata tertib sekolah memegang peranan penting, yaitu sebagai alat untuk mengatur perilaku atau sikap siswa di sekolah.

Menurut Soelaeman (1985: 82) berpendapat bahwa “peraturan tata tertib itu merupakan alat guna mencapai ketertiban”. Dengan adanya tata tertib itu adalah untuk menjamin kehidupan yang tertib, tenang, sehingga kelangsungan hidup sosial dapat dicapai. Tata tertib yang direalisasikan dengan tepat dan jelas serta konsekuen dan diawasi dengan sungguh-sungguh maka akan memberikan dampak

terciptanya suasana masyarakat belajar yang tertib, damai, tenang dan tentram di sekolah.

Peraturan dan tata tertib yang berlaku di manapun akan tampak dengan baik apabila keberadaannya diawasi dan dilaksanakan dengan baik, hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Durkheim (1990: 107-108) bahwa “hanya dengan menghormati aturan-aturan sekolahlah si anak belajar menghormati aturan-aturan umum lainnya, belajar mengembangkan kebiasaan, mengekang dan mengendalikan diri semata-mata karena ia harus mengekang dan mengendalikan diri”.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa sekolah merupakan wadah pendidikan yang akan membawa siswa ke kehidupan yang lebih luas yaitu lingkungan masyarakat, dimana sebelum siswa terjun ke masyarakat maka perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mengekang dan mengendalikan diri. Sehingga mereka diharapkan mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib, tenang, aman, dan damai.

Tata tertib sekolah berperan sebagai pedoman perilaku siswa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hurlock (1990: 76) bahwa “peraturan berfungsi sebagai pedoman perilaku anak dan sebagai sumber motivasi untuk bertindak sebagai harapan sosial”. Di samping itu, peraturan juga merupakan salah satu unsur disiplin untuk berperilaku.

Kemudian menurut Hurlock (1990: 84) mengemukakan fungsi tata tertib yaitu,

Bila disiplin diharapkan mampu mendidik anak-anak untuk berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial mereka, ia harus mempunyai empat unsur pokok, apapun cara mendisiplinkan yang digunakan, yaitu: peraturan sebagai pedoman perilaku, konsistensi dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang digunakan untuk mengajak dan memaksakannya, hukuman untuk pelanggaran peraturan dan penghargaan untuk perilaku yang sejalan dengan perilaku yang berlaku.

Tata tertib sekolah mempunyai dua fungsi yang sangat penting dalam membantu membiasakan anak mengendalikan dan mengekang perilaku yang tidak diinginkan, seperti yang dikemukakan oleh Hurlock (1990: 85), yaitu:

- a. Peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui oleh anggota kelompok tersebut. Misalnya anak belajar dari peraturan tentang memberi dan mendapat bantuan dalam tugas sekolahnya, bahwa menyerahkan tugasnya sendiri merupakan satu-satunya cara yang dapat diterima di sekolah untuk menilai prestasinya.
- b. Peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Agar tata tertib dapat memenuhi kedua fungsi di atas, maka peraturan atau tata tertib itu harus dimengerti, diingat, dan diterima oleh individu atau siswa. Bila tata tertib diberikan dalam kata-kata yang tidak dapat dimengerti, maka tata tertib tidak berharga sebagai suatu pedoman perilaku.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tata tertib berfungsi mendidik dan membina perilaku siswa di sekolah, karena tata tertib berisikan keharusan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Selain itu tata tertib juga berfungsi sebagai pengendali bagi perilaku siswa, karena tata tertib sekolah berisi larangan terhadap siswa tentang suatu perbuatan dan juga mengandung sanksi bagi siswa yang melanggarnya.

**Tabel 2.2 DAFTAR TATA TERTIB MTs DARUL HUFFASH
PESAWARAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

No	Jenis Pelanggaran	Bobot Point
1	Keterlambatan : a. Setiap terlambat setelah bel berbunyi b. Setiap izin keluar kelas pada saat jam belajar dan tidak kembali ke kelas c. Setiap keluar kelas saat jam belajar tanpa izin d. Setiap keluar sekolah tanpa izin e. Setiap tidak ikut upacara bendera tanpa izin	5 5 10 10 5
2	Kehadiran a. Setiap tidak masuk sekolah tanpa keterangan b. Setiap membolos	10 10
3	Pakaian/seragam sekolah a. Setiap memakai pakain tidak rapih b. Setiap tidak memakai ikat pinggang c. Setiap memakai sepatu diluar ketentuan sekolah d. Setiap tidak memakai kaos kaki sesuai ketentuan sekolah	5 5 5 5
4	Keperibadian a. Setiap siswa putra mengenakan gelang, kalung, tindik, bertato b. Setiap siswa putra rambut gondrong/panjang c. Setiap rambut dicat selain warna hitam d. Setiap meminta uang/barang orang lain dengan paksa atau ancaman e. Setiap mencuri dilingkungan atau di luar sekolah f. Setiap membawa <i>handphone</i> g. Setiap berkuku panjang h. Setiap mencemarkan nama baik sekolah dengan melakukan tindakan tidak senonoh/mengganggu ketertiban umum	10 5 10 25 50 25 3 75
5	Kebersihan dan keindahan a. Setiap tidak melaksanakan piket sesuai jadwal b. Setiap mencoret-coret dinding sekolah atau tempat lain yang dapat	5 20

	<p>mengganggu kebersihan dan keindahan</p> <p>c. Setiap buang air kecil tidak pada tempatnya</p> <p>d. Setiap merusak tanaman dengan sengaja</p>	<p>10</p> <p>10</p>
6	<p>Ketertiban umum</p> <p>a. Setiap merusak milik guru, sekolah dan teman secara sengaja</p> <p>b. Setiap membuat kegaduhan di dalam atau diluar kelas saat jam belajar</p> <p>c. Setiap merubah nilai atau identitas raport</p> <p>d. Setiap makan/minum di kelas saat jam belajar</p>	<p>20</p> <p>10</p> <p>25</p> <p>10</p>
7	<p>Senjata tajam</p> <p>a. Membawa senjata tajam tanpa izin</p> <p>b. Menggunakan senjata/api untuk mengancam atau melukai orang lain</p>	<p>20</p> <p>100</p>
8	<p>Rokok, narkoba, dan minuman keras</p> <p>a. Setiap membawa rokok ke dalam kelas</p> <p>b. Setiap merokok di dalam atau luar lingkungan sekolah</p> <p>c. Membawa narkoba atau minuman keras di dalam atau di luar lingkungan sekolah</p> <p>d. Mabuk karena narkoba atau minuman keras</p>	<p>20</p> <p>25</p> <p>80</p> <p>100</p>
9	<p>Bacaan/film porno</p> <p>Setiap membawa, melihat buku, CD, photo porno, atau menonton film porno/HP porno di lingkungan sekolah</p>	<p>75</p>
1	<p>Perkelahian/tawuran, intimidasi/ancaman</p> <p>a. Setiap menjadi provokator perkelahian</p> <p>b. Berkelahi antar siswa</p> <p>c. Berkelahi dan berdampak luas/tawuran</p> <p>d. Setiap mengancam/mengintimidasi sesama teman</p> <p>e. Setiap mengancam/mengintimidasi guru/TU, kepala sekolah</p>	<p>20</p> <p>25</p> <p>75</p> <p>20</p> <p>100</p>

Sumber : Data dokumentasi Sekolah MTs Darul Huffash Pesawaran tahun pelajaran 2012/2013

4. Perkembangan Sosial dan Moral Siswa

Pendekatan terhadap perkembangan sosial/moral anak dalam aliran psikologi kognitif lebih banyak dilakukan Kohlberg daripada Piaget sendiri selaku tokoh utama psikologi ini. Namun Kohlberg mendasarkan teori perkembangan sosial dan moralnya pada prinsip-prinsip dasar hasil temuan Piaget, terutama yang berkaitan dengan prinsip perkembangan moral.

2.3 Tabel Teori Dua Tahap Perkembangan Moral Versi Piaget

Usia anak	Tahap perkembangan moral	Ciri khas
4 – 7 tahun	Realisme moral (dalam tahap perkembangan kognitif praoperasional)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memusatkan pada akibat-akibat perbuatan 2. Aturan-aturan dipandang tak berubah 3. Hukuman atas pelanggaran bersifat otomatis
7-10 tahun	Masa transisi (dalam tahap perkembangan kognitif konkret-operasional)	Perubahan secara berharap ke arah pemilikan moral tahap kedua
11 tahun ke atas	Otonomi, realisme, dan resiprositas moral (dalam tahap perkembangan kognitif formal-operasional)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertimbangkan tujuan—tujuan perilaku moral 2. Menyadari bahwa aturan moral adalah kesepakatan tradisi yang dapat berubah.

Seperti yang tampak pada Tabel 2.1 tersebut, tahap-tahap perkembangan moral versi Piaget selalu dikaitkan dengan tahap-tahap perkembangan kognitif. Perkembangan yang pertama misalnya, bersamaan rentang waktunya dengan tahap perkembangan kognitif praoperasional. Tahap perkembangan yang berlangsung antara usia 4-7 tahun itu merupakan tahap realisme moral, artinya anak-anak menganggap moral sebagai suatu kenyataan yang ada dalam kehidupan sosial. Pada tahap kedua, perkembangan moral yang bertepatan dengan tahap perkembangan kognitif formal operasional itu menunjukkan bahwa manusia pada awal mas yuwana dan pascayuwana, yaitu masa remaja awal dan masa setelah remaja memiliki persepsi yang jauh lebih maju daripada sebelumnya. Para yuwana dan pascayuwana memandang moral sebagai sebuah perpaduan yang terdiri atas otonomi moral (sebagai hak pribadi), realisme moral (sebagai kesepakatan sosial), dan resiprositas moral (sebagai aturan timbal balik).

Pengikut Piaget, Lawrence Kohlberg mengemukakan tiga tingkat pertimbangan moral yang dilalui manusia prayuwana, yuwana, dan pascayuwana. Setiap tingkat perkembangan terdiri atas dua tahap perkembangan, sehingga secara keseluruhan perkembangan moral manusia itu dapat terjadi dalam enam tahap.

Tabel 2.4 Teori Enam Tahap Perkembangan Pertimbangan Moral Versi Kohlberg

Tingkat	Tahap	Konsep Moral
Tingkat I	<p><i>Moralitas prakonvensional</i> (usia 4-10 tahun)</p> <p>Tahap 1: memperhatikan ketaatan dan hukum</p> <p>Tahap 2: memperhatikan pemuasan kebutuhan</p>	<p>1. Anak menentukan tingkat hukuman akibat keburukan tersebut</p> <p>2. Perilaku baik dihubungkan dengan penghindaran diri dari hukuman</p> <p>Perilaku baik dihubungkan dengan pemuasan keinginan</p>

		dan kebutuhan diri sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang lain
Tingkat II	<p><i>Moralitas konvensional</i> (usia 10-13 tahun) Tahap 3: memperhatikan citra “anak baik”</p> <p>Tahap 4: memperhatikan hukum dan peraturan</p>	<p>1. Anak dan remaja berperilaku sesuai dengan aturan dan patokan moral agar memperoleh persetujuan orang dewasa, bukan untuk menghindari hukuman</p> <p>2. Perbuatan baik dan buruk dinilai berdasarkan tujuannya. Jadi ada perkembangan kesadaran terhadap perlunya aturan.</p> <p>1. Anak dan remaja memiliki sikap pasti terhadap wewenang dan peraturan</p> <p>2. Hukum harus ditaati oleh semua orang</p>
Tingkat III	<p><i>Moralitas pascakonvensional</i> (usia 13 tahun ke atas) Tahap 5: memperhatikan hak perseorangan</p> <p>Tahap 6: memperhatikan prinsip-prinsip etika</p>	<p>1. Remaja dan dewasa mengartikan perilaku baik sebagai hak pribadi sesuai dengan aturan dan patokan sosial</p> <p>2. Perubahan hukum dan aturan dapat diterima jika diperlukan untuk mencapai hal-hal yang paling baik</p> <p>3. Pelanggaran hukum dan aturan dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu</p> <p>1. Keputusan mengenai perilaku-perilaku sosial didasarkan atas prinsip-prinsip moralitas pribadi yang bersumber dari hukum universal yang selaras dengan kebaikan umum dan kepentingan orang lain</p> <p>2. Keyakinan terhadap moral pribadi dan nilai-nilai tetap melekat</p>

		<p>meskipun sewaktu-waktu berlawanan dengan hukum yang dibuat untuk mengekalkan aturan sosial. Contoh: seorang suami yang istrinya sedang sakit keras dan ia tidak punya uang untuk membeli obat untuk menyelamatkan nyawa istrinya itu. Ia yakin bahwa di satu sisi tindakan mencuri merupakan keharusan, sedang di sisi lain melestarikan kehidupan manusia itu merupakan kewajiban moral yang lebih tinggi daripada mencuri itu sendiri.</p>
--	--	---

B. Penelitian Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang menyangkut masalah tentang tata tertib di perguruan tinggi. Dari penelitian tersebut terdapat berbagai macam fokus yang ingin di analisis, baik mengenai peranannya, hubungannya, urgensi antara tata tertib dan faktor-faktor yang berkorelasi dengan hal tersebut. Beberapa penelitian tentang tata tertib tersebut salah satunya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Ketaatan Mematuhi Peraturan Sekolah. Skripsi ini ditulis oleh Etri Witantri tahun 2011 Universitas Lampung. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggambarkan pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap ketaatan mematuhi peraturan sekolah memiliki positif dan signifikan terhadap berjalannya peraturan sekolah.

2. Studi kasus sekolah dasar yang berjudul Perbedaan Jenis Kelamin Terhadap Kemampuan Siswa dalam Mata Pelajaran Matematika yang ditulis oleh Aminah Ekawati dan Shinta Wulandari tahun 2011 Universitas Borneo Tarakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan perbedaan kemampuan siswa laki-laki dengan siswa perempuan dalam mata pelajaran Matematika. Dengan hasil penelitian tidak ada perbedaan kemampuan yang signifikan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan, yang dilihat dari perolehan nilai rata-rata.
3. Skripsi yang berjudul Discipline Problems among Secondary School Students in Johor Bahru, Malaysia. Skripsi ini ditulis oleh Azizi Yahaya tahun 2009 Universiti Teknologi Malaysia. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan perbedaan yang signifikan antara masalah disiplin siswa seperti pembolosan, absensi, mencuri dan berkelahi di kalangan siswa sekolah menengah di Johor Bahru Kabupaten Pasir Gudang dengan prestasi akademik. Dengan hasil penelitian tidak ada perbedaan yang signifikan antara masalah disiplin siswa dengan pengaruh kelompok sebaya dan tingkat pendidikan orang tua.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, ada persamaan pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi yang akan penulis tulis. Namun yang membedakan dalam penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana perbedaan pelaksanaan tata tertib sekolah antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan.

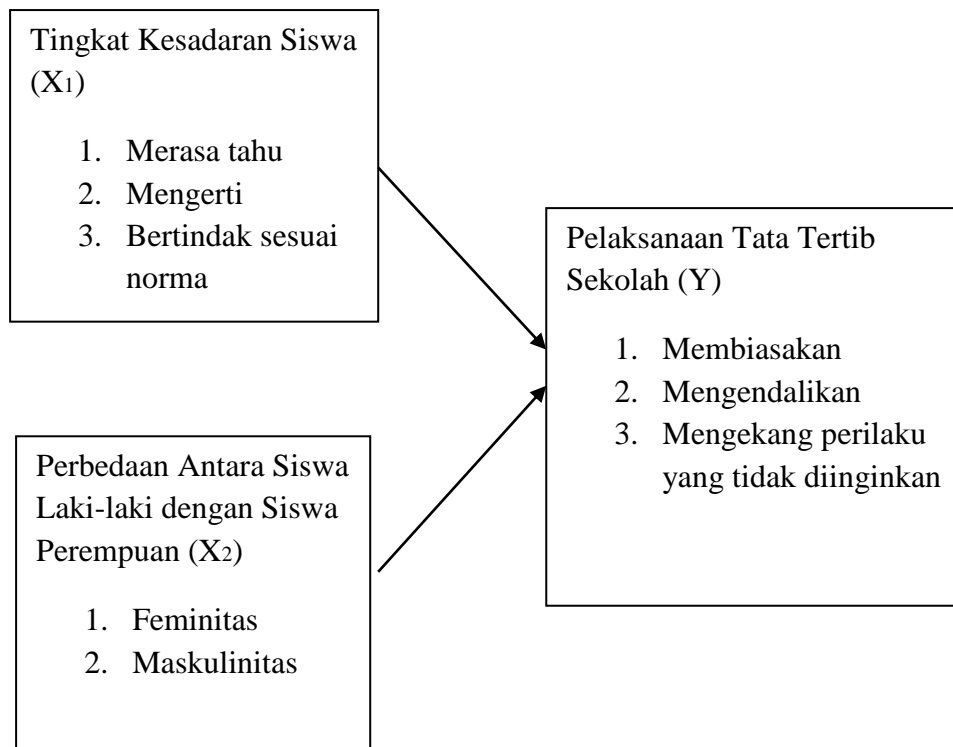
C. Kerangka Pikir

Tingkat kesadaran siswa adalah suatu keadaan seseorang yang tahu dan mengerti apa yang memang menjadi kewajibannya, dengan adanya kesadaran diri tersebut maka seseorang itu dapat mempengaruhi dirinya agar bertindak sesuai dengan kewajibannya.

Tata tertib sangatlah penting sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh siswa. Tata tertib dapat menciptakan disiplin dan orientasi akademis warga sekolah dan meningkatkan tujuan sekolah pada umumnya. Dengan tata tertib sekolah, warga sekolah diharapkan dapat mengembangkan pola sikap dan perilaku yang lebih disiplin dan produktif. Dengan adanya tata tertib sekolah, siswa memiliki pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di sekolah. Tata tertib bertujuan menanamkan sikap dan perilaku kepada siswa yang didasarkan atas nilai-nilai yang berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan sikap serta membentuk karakter anak sampai optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya.

Perbedaan tingkat kesadaran antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan dalam pelaksanaan tata tertib sekolah dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Dimana secara umum terdapat dua perbedaan sifat antara laki-laki dengan perempuan yang dilihat dari dua aspek yaitu maskulinitas dan feminitas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibentuk kerangka pikir sebagai berikut:



D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis dalam penelitian sebagai berikut:

1. H₀: Tidak terdapat perbedaan tingkat kesadaran antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan terhadap pelaksanaan tata tertib sekolah.
2. H_a: Terdapat perbedaan tingkat kesadaran antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan terhadap pelaksanaan tata tertib sekolah.